

ABSTRAK

Perseroan Terbatas Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR), perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan cara kerja PT. QSAR adalah menarik dana dari masyarakat selaku investor melalui proposal kerja sama di bidang agribisnis. Pada awalnya keuntungan para investor dibayarkan sesuai perjanjian. Akan tetapi mulai Januari 2002 PT. QSAR sudah mulai tidak mampu lagi membayar keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan bahkan modalnya pun tidak dapat dibayarkan, perusahaan tersebut tidak dapat membayar utang sebanyak Rp.482.294.075.343,- (empat ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) kepada 6.480 (enam ribu empat ratus delapan puluh) orang investor, PT. QSAR beserta Direksinya Ramli Araby dilaporkan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi untuk kepentingan umum. Permasalahan yang timbul: pengaturan mengenai kewenangan dan hambatan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara Kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kewenangan dan hambatan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan.

Metode pendekatan yang dilakukan yuridis normatif, merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang dilanjutkan data primer yang dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa Kewenangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dalam Perkara Kepailitan berdasarkan pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta peraturannya, Kejaksaan hanya berperan sebatas pengajuan permohonan pernyataan pailit dan persidangan, ketika Perseroan Terbatas pailit, maka pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator tanpa ada peran dari Kejaksaan lebih lanjut. Hambatan dan solusi dalam upaya pengajuan pailit, adanya salah satu investor merasa keberatan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit, karena adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.308 K/Pid/2004 dengan isi Putusan yang pada pokoknya membagi barang bukti (berupa uang, barang bergerak dan tidak bergerak) pada investor secara adil dan berimbang yang belum tuntas di eksekusi, justru dengan jalan instrumen pailit akan mempercepat membagi barang bukti secara adil dan berimbang.

Kata Kunci: Kejaksaan, Kepailitan, Kepentingan Umum, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Qurnia Subur Alam Raya Limited Company (PT. QSAR), a company engaged in agribusiness and the workings of PT. QSAR is attracting funds from the public as investors through collaborative proposals in the field of agribusiness. Initially the investors' profits are paid according to the agreement. However, starting in January 2002, PT. QSAR has begun to be unable to pay profits in accordance with what was promised and even the capital cannot be paid, the company cannot pay the debt as much as Rp. 482,294,075,343 (four hundred eighty two billion two hundred ninety four million seventy five thousand three hundred forty three rupiah) to 6,480 (six thousand four hundred eighty) investors, PT. QSAR and its Director Ramli Araby were reported bankrupt to the Central Jakarta Commercial Court by the District Prosecutor's Office in the public interest. Problems that arise: arrangements regarding the authority and barriers of the Prosecutor in submitting a petition statement for public interest in the Bankruptcy case No.23 / Pdt.Sus / Pailit / 2013 / PN.Niaga.Jkt.Pst. The purpose of this study is to determine the authority and barriers of the Prosecutor's Office in submitting a bankruptcy application for public interest in a bankruptcy case.

The approach of the normative juridical approach is a normative legal research and the approach used to solve research problems by examining secondary data first, followed by primary data in the field. This research was conducted at the Sukabumi District Prosecutor's Office.

The conclusion obtained in this study is that the authority of the District Attorney General of Sukabumi District in the Bankruptcy Case is based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations of Debt Payment and Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia along with its regulations, the Attorney General's Office only plays a role in filing bankruptcy statements and trials, when the Limited Liability Company becomes bankrupt, the bankruptcy is carried out by the Curator without further role of the Prosecutor's Office. Obstacles and solutions in an attempt to file bankruptcy, one of the investors objected to the filing of a bankruptcy statement, because of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.308 K / Pid / 2004 with the contents of the Decision which basically divided the evidence (in the form of money, movable property and not moving) to investors in a fair and balanced manner that has not yet been fully executed, precisely by means of bankruptcy instruments will accelerate the sharing of evidence in a fair and balanced manner.

Keywords: Attorney, Bankruptcy, Public Interest, Limited Liability Company.